



PENGARUH TATA KELOLA ASET DAERAH TERHADAP EFISIENSI ANGGARAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH

Annisa Hidayati¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh-Yusuf Kota Tengerang

Email: annisahidayati38@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola aset daerah terhadap efisiensi anggaran dan pengeluaran pemerintah. Tata kelola aset daerah yang baik diharapkan dapat meningkatkan penggunaan sumber daya yang ada secara optimal, mengurangi pemborosan, dan memaksimalkan hasil yang diperoleh dari pengeluaran anggaran pemerintah. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola aset yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan aset daerah pada beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi tata kelola aset terhadap efisiensi anggaran dan pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola aset daerah yang transparan dan akuntabel memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efisiensi anggaran dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, penerapan tata kelola aset yang lebih baik dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi keuangan daerah, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Tata kelola aset daerah, efisiensi anggaran, pengeluaran pemerintah, transparansi, akuntabilitas.

Abstract

This study aims to analyze the influence of regional asset governance on budget efficiency and government expenditure. Good governance of regional assets is expected to increase the optimal use of existing resources, reduce waste, and maximize the results obtained from government budget expenditures. In this study, an analysis was carried out on the application of asset management principles which include planning, supervision, and utilization of regional assets in several local governments in Indonesia. The method used is a quantitative approach with regression analysis to find out how much asset governance contributes to budget efficiency and government spending. The results of the study show that transparent and accountable regional asset management has a significant positive influence on the efficiency of the budget and government expenditure. Therefore, the implementation of better asset governance can providing a positive impact in improving regional financial efficiency, as well as supporting the achievement of sustainable development goals.

Keywords: Regional asset governance, budget efficiency, government spending, transparency, accountability.

PENDAHULUAN

Tata kelola aset daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang memiliki dampak langsung terhadap efisiensi anggaran dan pengeluaran pemerintah. Aset daerah, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, maupun aset lainnya, merupakan bagian integral dari kekayaan pemerintah daerah yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan pemanfaatan yang optimal. Pengelolaan aset yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan pemborosan, kerugian, atau bahkan penyalahgunaan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi penggunaan anggaran dan alokasi pengeluaran pemerintah daerah.

Penerapan tata kelola yang baik terhadap aset daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, karena aset yang ada dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Tata kelola aset yang

transparan dan akuntabel tidak hanya meningkatkan kinerja pemerintahan, tetapi juga membantu menciptakan iklim kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.ssss

Masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan aset daerah adalah ketidakteraturan pencatatan, minimnya pemanfaatan aset, dan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan aset yang ada. Hal ini dapat berimplikasi pada pemborosan anggaran dan pengeluaran yang tidak efektif, yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi pengaruh tata kelola aset daerah terhadap efisiensi anggaran dan pengeluaran pemerintah, agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola aset daerah terhadap efisiensi anggaran dan pengeluaran pemerintah dengan fokus pada daerah-daerah yang telah menerapkan sistem pengelolaan aset yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi tata kelola aset dalam meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah, serta memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh tata kelola aset daerah terhadap efisiensi anggaran dan pengeluaran pemerintah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel yang terlibat secara numerik, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif dan terukur. Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis adalah **tata kelola aset daerah** (sebagai variabel independen) dan **efisiensi anggaran serta pengeluaran pemerintah daerah** (sebagai variabel dependen).

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pengaruh tata kelola aset terhadap efisiensi anggaran dan pengeluaran pemerintah daerah. Dengan menggunakan analisis statistik, penelitian ini akan menilai sejauh mana tata kelola aset yang baik dapat mempengaruhi pengelolaan anggaran daerah, serta meningkatkan efisiensi pengeluaran.

2. Populasi dan Sampel

- Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang mengelola aset daerah dan memiliki laporan keuangan serta data terkait pengelolaan aset.
- Sampel penelitian ini terdiri dari beberapa pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem pengelolaan aset daerah yang terstandarisasi dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan sampel akan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih daerah yang dianggap relevan dengan topik penelitian, seperti daerah yang sudah menerapkan tata kelola aset daerah yang baik atau memiliki data keuangan yang lengkap.

3. Variabel Penelitian

- Variabel Independen: Tata Kelola Aset Daerah
Tata kelola aset daerah diukur dengan beberapa indikator seperti:
 - a. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset
 - b. Proses perencanaan, pengadaan, dan pemanfaatan aset daerah
 - c. Pengawasan dan evaluasi atas penggunaan aset
 - d. Pengelolaan aset yang efisien dan terintegrasi dengan sistem keuangan daerah.

- Variabel Dependen: Efisiensi Anggaran dan Pengeluaran Pemerintah Daerah
Efisiensi anggaran dan pengeluaran diukur berdasarkan indikator seperti:
 - a. Rasio belanja modal terhadap anggaran pemerintah daerah
 - b. Rasio pengeluaran tidak terencana (over budget)
 - c. Penggunaan anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah
 - d. Tingkat pemanfaatan aset yang sudah ada tanpa perlu pengadaan baru.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder:

- Data Primer: Dikumpulkan melalui survei atau wawancara terstruktur dengan pejabat pengelola keuangan dan aset daerah. Pertanyaan survei akan difokuskan pada implementasi tata kelola aset dan evaluasi terhadap efisiensi anggaran serta pengeluaran.
- Data Sekunder: Menggunakan data laporan keuangan daerah, dokumen perencanaan anggaran, serta dokumen terkait pengelolaan aset yang diambil dari instansi pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian. Sumber data sekunder juga mencakup laporan kinerja pengelolaan aset dan evaluasi audit yang relevan.

5. Teknik Analisis Data

- Analisis Deskriptif: Digunakan untuk menggambarkan data yang terkumpul mengenai tata kelola aset daerah dan efisiensi anggaran pemerintah daerah. Teknik ini akan menggambarkan gambaran umum dan karakteristik data yang ada.
- Analisis Regresi Linier Sederhana/Multi: Teknik ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tata kelola aset terhadap efisiensi anggaran dan pengeluaran daerah. Jika data yang terkumpul memungkinkan, analisis regresi linier berganda akan digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu faktor dalam tata kelola aset (misalnya transparansi, pengawasan, dan pemanfaatan aset) terhadap efisiensi pengeluaran.
- Uji Asumsi Klasik: Sebelum melakukan analisis regresi, uji asumsi klasik akan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi persyaratan seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, yang diperlukan dalam model regresi.

6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

- H1: Tata kelola aset daerah yang baik berpengaruh positif terhadap efisiensi anggaran pemerintah daerah.
- H2: Tata kelola aset daerah yang baik berpengaruh positif terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.

7. Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada daerah-daerah yang telah menerapkan pengelolaan aset daerah yang terstandarisasi, dengan fokus pada efisiensi anggaran dan pengeluaran pemerintah daerah dalam periode tertentu. Penelitian ini juga hanya akan mencakup pengaruh tata kelola aset terhadap efisiensi anggaran secara langsung, tanpa mengelaborasi faktor eksternal lainnya yang mungkin mempengaruhi pengeluaran pemerintah.

8. Keandalan dan Validitas

Keandalan instrumen pengumpulan data akan diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan data yang terkumpul dapat dipercaya. Selain itu, validitas eksternal penelitian akan diperkuat dengan memilih sampel yang representatif dari pemerintah daerah yang memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian.

9. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap:

- Pengumpulan data (bulan 1-2)

- Analisis data (bulan 3-4)
- Penyusunan laporan dan publikasi hasil (bulan 5).

Dengan metode yang terstruktur dan analisis yang tepat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh tata kelola aset terhadap efisiensi anggaran dan pengeluaran pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola aset daerah terhadap efisiensi anggaran dan pengeluaran pemerintah daerah. Berdasarkan analisis data yang dilakukan melalui survei, wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan serta dokumen terkait pengelolaan aset di pemerintah daerah yang menjadi sampel, beberapa temuan penting dapat disimpulkan. Salah satu masalah utama pengelolaan barang (aset) daerah adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset (Hartati et al., 2019).

1.1 Pengelolaan Aset Daerah

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang telah menerapkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel cenderung memiliki sistem manajemen aset yang lebih terorganisir dan efisien. Beberapa daerah yang berhasil menerapkan sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMDA), menunjukkan pengelolaan aset yang lebih baik dalam hal pendataan, pemanfaatan, dan pengawasan. Pengelolaan aset tetap pada dasarnya dilakukan untuk menghasilkan informasi yang andal dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dalam pengelolaannya (Ansar Abdu, 2024)

Namun, masih ada beberapa daerah yang menghadapi kendala dalam pengelolaan aset, terutama terkait dengan pencatatan aset yang tidak terintegrasi dengan baik, ketidaktepatan pemanfaatan aset, serta pengawasan yang lemah atas penggunaan aset yang ada. Hal ini menyebabkan pemborosan dan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran daerah (*Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia - Nick Devas - Google Buku*, n.d.).

1.2 Efisiensi Anggaran dan Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan analisis terhadap pengeluaran pemerintah daerah, ditemukan bahwa daerah yang memiliki tata kelola aset yang baik cenderung lebih efisien dalam pengelolaan anggaran. Pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan aset daerah yang ada, lebih terkendali dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, daerah yang belum optimal dalam mengelola aset cenderung mengalokasikan anggaran untuk pengadaan baru, yang seharusnya bisa dialihkan untuk pemeliharaan atau pengoptimalan aset yang sudah ada (Darman, 2015). Permendagri No. 17 Tahun 2007 menyatakan ada 13 siklus yang harus dilalui dalam pengelolaan aset, namun hanya 6 siklus pengelolaan aset tetap yang melibatkan DPPKAD sebagai pembantu pengelola. Pembantu pengelola adalah unit kerja yang membantu pengelola (Sekretaris Daerah) untuk meneliti, menghimpun laporan bahkan menjadi penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan pengelolaan barang milik daerah (Pinatik et al., 2015)

Dalam hal pengeluaran yang tidak terencana atau overbudget, daerah yang memiliki sistem pengelolaan aset yang terstruktur lebih mampu mengidentifikasi dan mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan, sehingga anggaran yang tersedia bisa digunakan lebih efisien. Sebaliknya, daerah dengan tata kelola aset yang lemah cenderung mengalami pemborosan anggaran.

1.3 Hasil Analisis Regresi

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tata kelola aset daerah berpengaruh positif yang signifikan terhadap efisiensi anggaran dan pengeluaran pemerintah daerah. Koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan bahwa setiap peningkatan kualitas tata kelola aset akan

meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan pengeluaran. Secara khusus, variabel pengelolaan aset yang baik, seperti transparansi, pemanfaatan yang optimal, dan pengawasan yang ketat, menunjukkan hubungan yang sangat signifikan dengan pengurangan pemborosan anggaran dan pengeluaran yang lebih terencana.

2. Pembahasan

2.1 Pengaruh Tata kelola Aset Terhadap Efisiensi Anggaran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola aset daerah yang baik berkontribusi signifikan terhadap efisiensi anggaran pemerintah daerah. Daerah yang mengimplementasikan tata kelola aset yang terencana dan terstruktur dengan baik memiliki kontrol yang lebih baik terhadap alokasi anggaran (Mardiasmo, 2018). Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan social (Kusuma, 2017). Dengan pengelolaan aset yang optimal, seperti penggunaan aset yang sudah ada secara maksimal, pemerintah daerah dapat mengurangi pengeluaran untuk pembelian barang atau aset baru, yang seharusnya tidak perlu dilakukan jika pemanfaatan aset yang ada sudah efisien. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah (Fauziah et al., 2023).

Misalnya, daerah yang memiliki data aset yang lengkap dan terintegrasi dapat melakukan pemetaan terhadap aset yang belum digunakan atau belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini membantu merencanakan alokasi anggaran secara lebih tepat, sehingga anggaran yang ada dapat digunakan untuk kepentingan lain yang lebih prioritas. Tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya masalah yang terjadi dalam manajemen keuangan daerah yaitu, masih tingginya proporsi anggaran untuk belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai, dari pada belanja langsung, baik berupa dana pelayanan publik atau dana investasi yang terkait langsung dengan tujuan organisasi, sehingga mengakibatkan rendahnya nilai kinerja pemerintah di mata masyarakat (Tahir et al., 2019).

2.2 Pengaruh Tata kelola Aset Terhadap Efisiensi Pengeluaran

Tata kelola aset yang efektif juga mempengaruhi efisiensi pengeluaran daerah. Pengelolaan aset yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan aset yang ada tanpa harus mengeluarkan biaya untuk pengadaan barang atau fasilitas baru. Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang ketat atas penggunaan aset juga mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau pemborosan anggaran. Kewenangan pemerintah daerah adalah mengumpulkan dan memanfaatkan pajak dan retribusi, serta mendapatkan hasil atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Mukti, 2023). Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan (Maramis, 2020). Peningkatan PAD merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Kusuma, 2017).

Daerah yang memiliki pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel cenderung memiliki catatan yang jelas mengenai penggunaan aset, baik dalam hal pemeliharaan, penyewaan, maupun pemanfaatan untuk kegiatan pembangunan (Rochmanjsh & Sholeh, 2010). Hal ini akan berdampak pada pengurangan pengeluaran yang tidak perlu, karena pemanfaatan aset yang tidak optimal dapat diminimalkan atau dihindari. Selain melalui perbaikan kualitas

institusi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah perlu melakukan intervensi dalam pembangunan melalui berbagai kebijakan ekonomi. Salah satunya melalui kebijakan anggaran pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bentuk kontribusi pemerintah dalam pembangunan melalui kebijakan fiskal yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui masuknya FDI ke suatu negara (Widianatasari & Purwanti, 2021).

Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Rondonuwu et al., 2019). Sebaliknya, daerah yang tidak memiliki sistem pengelolaan aset yang baik cenderung menghabiskan anggaran yang lebih besar untuk pembelian aset baru atau pengeluaran yang tidak mendukung program prioritas pembangunan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan analisis dan evaluasi pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu dengan menganalisis faktor-faktor yang dapat menjadi celah signifikan untuk memaksimalkan keuangan daerah. Namun, kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan APBD telah ditingkatkan melalui pemberian penghargaan dan sanksi, tetapi ternyata tidak selalu diikuti dengan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (Kusumaningrum & ..., 2024). Sebagai contoh, beberapa daerah yang tidak memanfaatkan aset yang dimiliki, seperti bangunan atau kendaraan, sering kali terjebak dalam pembelian barang baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan jangka panjang.

2.3 Keterkaitan antara Tata Kelola Aset dan Pengawasan Anggaran

Pengawasan yang kuat atas pengelolaan aset daerah berperan penting dalam menciptakan efisiensi anggaran dan pengeluaran. Keuangan daerah menjadi bagian dari keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu pada pasal 16 ayat 1 menyebutkan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah (Manimbaga et al., 2021). Pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan sistem pelaporan yang transparan memungkinkan pemerintah daerah untuk memonitor secara real-time penggunaan dan status aset yang ada. Ini tidak hanya membantu dalam menghindari pemborosan, tetapi juga memungkinkan deteksi dini terhadap ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan rencana awal. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan oleh pembantu pengelola, pengguna dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPB- MD) yang ada di Dinas Kesehatan (Amir & Djasuli, 2016).

2.4 Tantangan dalam Implementasi Tata Kelola Aset yang Efektif

Meskipun hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara tata kelola aset yang baik dan efisiensi anggaran, implementasi tata kelola aset yang optimal masih dihadapkan pada beberapa tantangan (*BUKU AJAR PAJAK DAN TATA KELOLAH - Evanny Emanuela Rumui, Gema Sekar Sari, Sanita Nur Hidayah, Rochmad Bayu Utomo, Azfa Mutiara Ahmad Pabulo - Google Buku, n.d.*). Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dan retribusi saja, namun dapat dari pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien. Strategi optimalisasi pengelolaan aset daerah serta kontribusi aset daerah terhadap pendapatan asli daerah guna melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (AICPA, 2018) . Beberapa daerah menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia yang terlatih, keterbatasan teknologi informasi, serta resistensi terhadap perubahan dalam manajemen aset. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pembinaan yang berkelanjutan bagi aparat pemerintah daerah agar dapat melaksanakan pengelolaan aset yang lebih efisien. Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola

perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Mekanisme (A. F. & D., 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola aset daerah yang baik berpengaruh signifikan terhadap efisiensi anggaran dan pengeluaran pemerintah daerah. Penerapan sistem pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi dapat mengurangi pemborosan anggaran serta memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengelolaan aset dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- A. F., D., & D., D. (2017). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas, Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- AICPA. (2018). Fair Value. *Audit and Accounting Guide*, 04(01), 557–583. <https://doi.org/10.1002/9781119558361.ch20>
- Amir, M. F., & Djasuli, M. (2016). Mekanisme Pemeliharaan Aset dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep. *Jurnal Pamator*, 9(2), 72–77.
- Ansar Abdu, R. A. J. K. (2024). Sistem Pengelolaan Aset Tetap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. *Edunomika*, 08(02), 1–10.
- BUKU AJAR PAJAK DAN TATA KELOLAH - Evanny Emanuela Rumui, Gema Sekar Sari, Sanita Nur Hidayah, Rochmad Bayu Utomo, Azfa Mutiara Ahmad Pabulo - Google Buku.* (n.d.).
- Darman. (2015). *Kinerja Keuangan Daerah Keuangan Daerah*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6777009/fluktuasi-adalah-pengertian-jenis-dan-cara-mengatasinya#:~:text=Hal ini terjadi karena pengaruh,atau kemunduran yang selalu berubah>.
- Fauziah, N. N., Zakaria, S., & Yunita, D. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021. *Jurnal Administrasi* ..., 3(November), 368–377. <http://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/download/52905/22062>
- Hartati, S., Winarko, H., & Martini, R. (2019). Manajemen Aset bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Kajian pada Pemerintah Kota Palembang). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya*, 3(1), 40–51.
- Keuangan pemerintah daerah di Indonesia - Nick Devas - Google Buku.* (n.d.).
- Kusuma, A. R. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 403–420.
- Kusumaningrum, Y. G. I., & ... (2024). Analisis Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kota Kupang Tahun 2018-2022. ... of Economics and ..., 6, 64–82. <https://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id/jurnal/index.php/econbank/article/view/315%0Ahttps://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id/jurnal/index.php/econbank/article/download/315/313>
- Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Hitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA*, 9(2), 982–992.
- Maramis, L. E. C. K. D. C. R. M. T. B. (2020). Analisis Kemandirian, Efektivitas, Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 88–98.

- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (p. 380). https://www.google.co.id/books/edition/Otonomi_Manajemen_Keuangan_Daerah/6_BB_EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Mukti, T. (2023). Analisis Keuangan Publik Syariah Terhadap Pengelolaan Anggaran Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kulon Progo. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 9(2), 92–105. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v9i2.20271>
- Pinatik, S., Ilat, V., & Kolinug, M. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 818–830. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7556>
- Rochmanjsah, & Sholeh. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah* (p. 99).
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2019). Analysis Efficiency and Effectiveness Regional Financial Management in Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 23(4), 23–32.
- Tahir, I., Mas'ud, M., & Plyriadi, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. *Jurnal Riset Bisnis*, 93(1), 66–74.
- Widianatasari, A., & Purwanti, E. Y. (2021). Pengaruh Kualitas Institusi, Pengeluaran Pemerintah, dan Foreign Direct Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Ecoplan*, 4(2), 86–98. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.286>